

Peran Jerman dan Prancis pada Kebijakan Uni Eropa dalam Merespon Krisis Energi Pasca Brexit

Dzia Istiqlal

Kata Kunci

brexit, uni eropa, krisis energi, organisasi supranasional, konflik rusia-ukraina

Abstrak

Melalui terbelisitnya berbagai fakta mengenai dominannya Prancis dan Jerman setelah keluarnya Inggris dalam menahkodai arah organisasi supranasional Uni Eropa (UE) menunjukkan bahwa kekuasaan, kepentingan, bisa terwujudkan apabila ada power yang dimiliki suatu negara. Tulisan ini akan membahas tentang kebijakan luar negeri UE berkaitan dengan respon yang mereka berikan terhadap krisis energi yang menerjang terutama negara yang menjadi pemegang kunci seperti Jerman dan Prancis pasca keluarnya Inggris melalui peristiwa Brexit. Untuk memahami segala aspek permasalahan, tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menemukan dan menjelaskan semua informasi terkait yang didapatkan penulis. Hasil yang didapatkan penulis adalah dengan tidak adanya Inggris cukup mempengaruhi keadaan Uni Eropa khususnya slot pengisi sumber dana yang diisi oleh Jerman maupun Prancis dimana pendanaan ditutupi oleh kedua Negara tersebut. Hal ini sangat mempengaruhi kebutuhan pada sektor sektor program yang dikembangkan khususnya pada permasalahan energi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Uni Eropa merupakan satuan politik dan ekonomi yang terdiri dari 27 anggota negara, pada awal kehadiran Uni Eropa yaitu pasca berakhirnya perang Dunia ke 2 dimana Uni Eropa memiliki tujuan untuk mewujudkan perdamaian tanpa adanya perang pada benua Eropa. Uni Eropa sendiri memerlukan waktu untuk membangun Persatuan tersebut dimana mereka menyempurnakan persatuan tersebut melalui thapan yang jalan secara berangsur, melalui traktat demi traktat yang awalnya didirikan oleh 6 negara anggota pada tahun 1957 dan terus berkembang hingga saat ini menjadi 27 negara. Uni Eropa melalui traktat – traktat untuk membentuk kesepakatan antara anggota memunculkan berbagai kemajuan berupa kebijakan – kebijakan seperti Uni Eropa memiliki mata uang sendiri, dimana negara – negara anggota juga menggunakan mata uane Euro sebagai alat tukar resmi Uni Eropa, Uni Eropa juga memantau serta mengatur berbagai bidang seperti permasalahan perdagangan, pasar internasional, energi, komunikasi dan lainnya, Uni Eropa juga memiliki sistem pemerintahan yang rapi dan terperinci untuk menopang sistem kerja Organisasi supranasional Uni Eropa¹

Dengan kehadiran Uni Eropa serta proses terbentuknya dan utuhnya Uni Eropa sampai saat ini tidak lepas dari porises waktu yang cukup lama diantaranya pembentukan ECSC (*European Coal and Steel Community*) pada 20 Januari 1950, kemudian berkembang menjadi EEC (*European Economic Community*) dan Euratom (*European Atomic Energi Community*). Dan pada tahun 1957 keduana komunitas yang dibentuknya akhirny dilebur kembali menjadi EC (*European Community*) dan pada tahun 1992 melalui traktat Maastricht Berganti nama menjadi EU (*European Union*). Dengan berkembang pestnya EU menjadi daya tarik beberapa negara di Eropa untuk menjadi anggota EU tidak terkecuali Inggris juga memiliki minat untuk menjadi anggota Uni Eropa yang pada tahun 1961 mengajukan proposal keanggotaan namun ditolak oleh Presiden Prancis Charles de Gaulle yang kala itu cukup dominan dalam menentukan arah keputusan Uni Eropa, namun Inggris telah sah menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 1973 pasca berakhirnya jabatan Charle De Gaulle. Pada tahun 1954, adalah tahun terbentuknya Perjanjian Roma melalui kesepakatan 6 negara anggota pembentuk Uni Eropa dan membentuk European Economic Community – EEC (Masyarakat Ekonomi Eropa, dengan capaian akhir adalah membentuk pasar bersamapara anggota EEC telah sepakat untuk menghapus bea impor dan berbagai jenis pajak serta regulasi dalam transaksi ekonomi, serta mengatur juga lalu-lintas barang antar negara. serta negara-negara EEC juga cukup terbuka untuk menambah anggota baru yang ingin mengajukan untuk bergabung. Dengan terbukanya EEC pada Tahun 1973 bergabung

¹ FERN, “ Panduan Singkat Tentang Uni Eropa” *Life Program of The European Union dan Ford Foundation*, 2021, 1–3
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2021/PANDUAN_SINGKAT_TENTANG_UNI_EROPA_BAHASA.pdf

Inggris, Irlandia dan Denmark bergabung dengan EEC. Kemudian tahun 1980-an disusul Yunani, Spanyol dan Portugal.²

Pada tanggal 1 November 1993, negara-negara MEE menyetujui Traktat Maastricht untuk mendirikan Uni Eropa. Kesepakatan itu menyetujui antara negara-negara anggota untuk bekerjasama di bidang keadilan dan keamanan. Selain itu, pengenalan mata uang bersama, euro, disepakati dalam perjanjian ini. Bergabung dengan UE mengharuskan Inggris untuk mengoordinasikan kebijakan yang diterapkan di Uni Eropa. Inggris Raya juga merupakan salah satu anggota Uni Eropa dengan pendapatan nasional tertinggi. Sementara bagian dari Uni Eropa, Inggris juga menikmati berbagai manfaat, termasuk: B. Menghilangkan hambatan perdagangan dan mempromosikan impor dan ekspor di Eropa. Namun, ini tidak serta merta memenuhi persetujuan semua pemangku kepentingan Inggris. Menyusul penilaian dan review efektivitas Inggris di Uni Eropa, beberapa Pihak telah menyatakan penentangan terhadap akses Uni Eropa ke Inggris.³

Namun, keanggotaan Inggris berakhir pada tahun 2016, lebih tepatnya pada tanggal 23 Juni 2016 dimana masyarakat Inggris lebih menginginkan untuk tidak menjadi bagian dari Uni Eropa dimana keputusan ini ditentukan langsung oleh Perdana Menteri David Cameron walaupun sebelumnya lebih menginginkan Inggris tetap sebagai bagian dari Uni Eropa dan justru sebagai pelaksana serta memiliki peran untuk menjalankan Referendum Brexit, Ini juga didukung oleh Partai Buruh, Hasil referendum menunjukkan bahwa rakyat Inggris ingin keluar dari Uni Eropa.⁴ Namun, berbagai negosiasi perlu dilakukan antara kedua belah pihak untuk mengatur berbagai hal ke depan. Yang pertama adalah pemisahan ekonomi yang saat ini terikat antara Inggris dan Uni Eropa. Proses ini dapat memakan waktu dua tahun atau lebih, dan selama negosiasi ini Inggris akan dianggap sebagai negara anggota Uni Eropa. Artinya, Inggris harus mematuhi semua aturan dan perjanjian akses, tetapi tidak lagi memiliki suara dalam pengambilan keputusan.

Dengan keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa jelas meninggalkan banyak kerugian, tidak hanya pihak Inggris sebagai negara yang memilih mundur tapi juga Induk Organisasi yaitu Uni Eropa yang juga mendapat dampak yang buruk berupa hilangnya kewajiban-kewajiban serta pos-pos yang ditinggal Inggris dan harus ditutup oleh anggota negara Uni Eropa lainnya. Hal ini juga berdampak pada pengambilan kebijakan dimana banyak kebijakan

² Hendra Pasuhuk, "Sejarah Terbentuknya Cikal Bakal Uni Eropa 70 Tahun Lalu" DW, 24 Mei 2019, <https://www.dw.com/id/sejarah-terbentuknya-cikal-bakal-uni-eropa-70-tahun-lalu/a-48861327#:~:text=Untuk%20pertama%20kalinya%20sejak%20akhir,menjadi%20cikal%20bakal%20Uni%20Eropa>

³ Muhammad Farhan Anshari dan Rusdiyanta "Potensi Dampak Brexit Terhadap Perekonomian Inggris" (2020), hlm. 196. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjs5rGSutvyAhUUfSsKHTBBCIgQFnoECAKQAQ&url=https%3A%2F%2Fjom.fisip.budiluhur.ac.id%2Findex.php%2Fbalcony%2Farticle%2Fdownload%2F231%2F111&usg=AOvVaw3q482zuaQVs22nWytmFoZ3>

⁴ Indah Sri Lestari, "Penarikan diri Inggris dari Uni Eropa tahun 2016", Vol.5, No.3(2017) p.1025 - 1030

sangat bergantung kepada tiga negara kuat seperti Inggris, Perancis dan Jerman. Hal ini bisa terlihat bagaimana dominasi ketiga negara tersebut salah satunya penolakan Jerman untuk mengikuti perubahan label produk dari “*Made in Germany*” menjadi “*Made in EU*” menjadi bukti kuat bahwa kekuatan suatu negara juga bisa memberi *pressure* pada suatu kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa negara – negara lain masih memperlihatkan kelemahannya dan sulit untuk tidak satu jalur dari kebijakan Uni Eropa yang lebih didominasi Jerman, Perancis dan Inggris. Namun bukan berarti secara penuh Uni Eropa dikontrol oleh Jerman dan Perancis dikarenakan Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang memiliki sistem internasional yang kuat dikarenakan tiga hal poin penting berupa *national consciousness*, *national situation*, dan *nationalism*.⁵

Melalui terbelitnya berbagai fakta mengenai dominannya Perancis dan Jerman setelah keluarnya Inggris dalam menahkodai arah organisasi supranasional Uni Eropa menunjukkan bahwa kekuasaan, kepentingan, bisa terwujudkan apabila ada *power* yang dimiliki suatu negara. Negara anggota yang memiliki *power* kemampuan militer dan teknologi yang lebih mumpuni dan memiliki sumbangsih kuat pada organisasi internasional seperti memiliki hak veto di dewan keamanan serta memiliki kekuatan ekonomi dunia memiliki sikap yang berbeda dibandingkan anggota yang tidak memiliki kekuatan seperti negara yang memiliki tersebut, hal ini memberikan dampak berupa hambatan pada kebijakan luar negeri Uni Eropa karena memiliki kepentingan yang berbeda-beda⁶ Hal ini menjadikan bahwa pembuatan kebijakan luar negeri Uni Eropa menjadi beban bagi anggota menengah ke bawah karena secara tidak langsung negara menengah kebawah akan mengikuti kebijakan negara yang memiliki *power* lebih besar, dikarenakan negara yang memiliki *power* akan cenderung bertindak secara bilateral, trilateral atau pengaturan terbatas. Hal ini bisa terlihat pada posisi kursi permanen dewan keamanan PBB serta status nuklir yang dimiliki Perancis serta Inggris yang sudah menyatakan keluar dari UE yang memiliki hak istimewa terhadap itu. Namun dalam pembuatan kebijakan luar negeri Uni Eropa tetap mempunyai syarat untuk bisa memberlakukan atau menetapkan kebijakan tersebut.

Ada beberapa alasan yang menjadikan Perancis dan Jerman memiliki dominasi dalam menentukan arah kebijakan mereka seperti Perancis yang memiliki pangkalan militer yang besar di luar negeri. Hal ini menjadikan Perancis tidak memberikan ruang pendapat bagi anggota lainnya terkhusus mengenai kerangka kerja dan legitimasi multilateral untuk tindak militerisasi. Dan terdapat kesenjangan kekuatan Uni Eropa antara negara – negara kecil dibandingkan Perancis dan Jerman, namun kekuatan negara besar tersebut tidak cukup dan memiliki keterbatasan hal ini membuat dan membutuhkan kemitraan dengan negara-negara Uni Eropa

⁵ Muhammad Rizki Firzani, “Penolakan Jerman Terhadap Pergantian *Made In Germany* menjadi *Made In EU* tahun 2010 - 2014”, Vol.2, No.2(2015) p.1 – 4, [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/e-journal%20Indah%20Sri%20Lestari%20\(08-23-17-03-52-34\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/e-journal%20Indah%20Sri%20Lestari%20(08-23-17-03-52-34).pdf)

⁶ Ray S. Cline, “World Power Trends and U.S. Foreign Policy for the 1980s,” in *Politics & International Relations*, 1st Ed. (New York: Routledge, 1980), <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780429267918>.

lainnya dalam menentukan kebijakan luar negeri yang diterima secara nasional dan internasional.

Hantaman demi hantaman terus menerjang Uni Eropa termasuk kembali pecahnya hubungan Ukraina dan Rusia, memberikan efek yang cukup serius terkhusus wilayah Uni Eropa, dimana anggota-anggota Uni Eropa memiliki ketergantungan pasokan energi dari Rusia, yang menjadi pertanyaan bagi tindakan yang diambil oleh Uni Eropa dalam upaya menanggulangi permasalahan krisis sumber daya energi ditengah-tengah pemberlakuan embargo terhadap Rusia dengan harapan berhentinya Rusia untuk mengambil tindakan agresif terhadap Ukraina. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa mengambil jalan keluar dari kebutuhan energi berupa tindakan seperti membuat transisi energi ke bentuk sumber energi baru terbarukan (EBT). Hal ini perlu diambil agar Uni Eropa memiliki *power* terhadap Rusia dengan tidak terlalu bergantung terhadap energi milik Rusia. Rencana tersebut bukan sekedar isapan jempol belaka, ada beberapa upaya untuk mewujudkan hal tersebut, melalui negara – negara Uni Eropa yang memiliki *power* lebih dominan dibandingkan anggota lainnya seperti Prancis dan Jerman.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron sudah mengumumkan rencana pembangunan duabelas buah pembangkit listrik tenaga nuklir dengan tujuan untuk membatasi penjualan gas alam Rusia ke utilitas Prancis, serta tindakan mantan kanselir Jerman Gerhard Schroder yang kini menjabat sebagai chairman perusahaan minyak terbesar milik Rusia yaitu, Rosneft membantu Jerman untuk membekukan proyek pipa gas Nord Stream 2 walaupun status Jerman saat ini sangat dekat dengan Rusia. Upaya – upaya juga dilakukan oleh Jerman dimana Jerman menyetujui anggaran sebesar Uss 68 Miliar pada bulan Desember 2021 mengenai proyek infrastruktur hijau dan iklim.⁷

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tercantum sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan yaitu *“Bagaimana Peran Jerman dan Prancis pada Kebijakan Uni Eropa dalam Merespon Kebutuhan Pasokan Energi Pasca Brexit?”*

⁷ Happy Fajrian,” Uni Eropa siapkan strategi Energi baru agar tak tergantung gas Rusia “, diakses pada Senin, 11 April dari Katadata.co.id <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6218cd9316c2c/uni-eropa-siapkan-strategi-energi-baru-agar-tak-tergantung-gas-rusia>.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Teoretis

Teori Konstruktivisme

Fokus utama konstruktivisme adalah pada kesadaran manusia atau kesadarn dan tempatnya pada dalam urusan dunia. Banyak teori HI, dan khususnya neorealisme, adalah materealis memfokuskan pada bagaimana distribusi kekuatan meterila seperti kekuatan militer dan kemampuan ekonomi, mendefinsikas keseimbangan kekuatan antar negara dan menerangkan perilaku negara. kaum kontruktivis menolak fokus materi satu sisi tersebut. Mereka berpendapat bahwa yang paling penting adalah sosial, bukan material. Lebih lanjut, mereka berpendapat realitas sosia ini tidak objektif, atau eksternal, bagi pengamta internsional. Dunia sosial dan politik, termasuk dunia hbungan internsional, bukanlah entitas fisik atau objek material yang berada di luar keesadaran manusia. Jika pemikiran dan ide yang masuk dalam keberadaan hubungan internsional berubah, maka sistem itusendiri juga akan berubah karean sistem terdiri dari oemikiran dan ide. Itulah pandangan dibalik frasa yang sering di ulang oleh para pakar konstruktivis.

Konstruktivisme adalah teori sosial dan dan sejumlah teori substantifyang berbeda; bagian ini adalah tentang konstruktivisme sebagai teori sosial; bagian selanjutnya adalah tentang teori konstruktivis HI. Dalam teori sosial para konstruktivis menekankan konstruksi realita sosial. Hubungan manusia, termasuk hubungan internsional, terdiri dari pemikiran dan ide dan pada dasarnya bukan merupakan kondisi aterial atau kekuatan. Hal ini secara filosofi meruoakan emen idealis konstruktivisme yang berbalikan dengan filosofi materealis tentang banyak positivisme ilmu penegtahuan sosial. Menurut filsafat konstruktivis, dunia sosial bukanlah sesuatu yang biasa: ia bukanlah sesuatu 'di luar sana' yang ada dalamnya. Ia bukanlah realistas eksternal yang hukumnya dapat ditemukan dengan riset ilmiah dan diterangkan dengan teori ilmiah, seperti yang diargumenkan para positivis dan behavioris. Dunia sosial dan politik bukanlah bagian dari alam. Tidak ada hukum masyarkata atau ekonomi politik yang alamiah. Sejarah bukan merupakan proses eksternal yang berevolusi yang bersifat independen terhadap pemikiran dan ide manusia. Hal itu berarti bahwa ilmu penegtahuan sosiologi atau ekonomi atau politik atau studi tentang sejarah tidak dapat menjadi 'pengetahuan' objektif dalam makna kata positivis yang tepat.

Pada dasarnya kosntruktivisme terbagi menjadi tiga komponen penting Pada dasarnya, konstruktivisme dapat dibagi menjadi tiga elemen penting. Jadi *pertama* tentang hakikat aktor. Konstruktivisme melihat aktor internasional tidak hanya sebagai warga negara, tetapi juga sebagai aktor non-negara. Aktor non-negara yang dimaksud adalah advokat internasional yang memperjuangkan isu-isu normatif seperti hak asasi

manusia, demokrasi, lingkungan dan gender. Menurut kaum konstruktivis, lembaga-lembaga ini sangat berpengaruh karena memiliki peluang untuk mempengaruhi kebijakan negara melalui beberapa agenda penting.

Kedua, tentang kepentingan nasional. Konstruktivisme mengasumsikan bahwa urusan internasional adalah realitas yang dibangun secara sosial. Singkatnya, hubungan internasional konstruktivis adalah produk interaksi sosial antar aktor. Artinya, konsep konstruktivis tentang kepentingan nasional didasarkan pada asumsi bahwa kepentingan nasional dikonstruksi secara sosial. Bagi konstruktivis, kepentingan nasional tidak bersifat terpisah dari konstruksi aktornya, tetapi intrinsik atau inheren dalam proses konstruksi sosial. Sederhananya, kepentingan nasional terwujud dalam proses interaksi antar pemangku kepentingan, bukan hanya sebagai tindakan yang dituntut oleh suatu bangsa. Akibatnya, kepentingan nasional terus berubah dan bervariasi dari satu negara ke negara lain. Konsep kepentingan nasional tergantung pada situasi sosial yang dihadapi aktor.

Ketiga, tentang hakikat struktur internasional. Untuk konstruktivis, struktur internasional terdiri dari unsur-unsur yang tidak terlihat atau idealis. Ketika elemen-elemen ini menejaskan dirinya dalam bentuk yang berbeda, seperti ide, identitas, budaya, norma, dll. Ada tiga jenis teori konstruktivis: satu yang menekankan konsep identitas, satu yang menekankan konsep norma dan konsep identitas, dan satu yang menekankan konsep norma dan pentingnya faktor linguistik. Pentingnya unsur bahasa.⁸

Melalui ketiga poin tersebut bisa terlihat bagaimana konsep identitas dimana negara merupakan aktor internasional yang paling penting. Hal ini bisa terlihat bagaimana Perancis dan Jerman memiliki dominasi dalam menentukan serta mematuhi kebijakan yang dimiliki Uni Eropa termasuk keadaan krisis energi dengan beberapa upaya yang diambil seperti pembatasan penggunaan energi terbarukan serta mencari jalan keluar menggunakan energi yang ramah lingkungan yang mana keputusan tersebut tentunya tidak semua bisa melaksanakan dengan baik oleh anggota – anggota Uni Eropa.

Kerangka Konseptual

Renawable Energi Direvtive 2009

Kebijakan *Sustainable development* lahir dari ketergantungan Uni Eropa pada sumber energi fosil. Pertama, pada tahun 2001, Dewan Eropa Gothenburg mengembangkan *Sustainable Development Strategy* (SDS) pertama, sebuah cetak biru untuk implementasi kebijakan pembangunan Uni Eropa yang berfokus pada sumber energi terbarukan. Rancangan ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat

⁸ Mohammad Rosyidin, *Teori Hubungan Internasional Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*, ed. by Yayat Sri Hayati, First Edit (Depok: Rajawali Pers, 2020).

tujuannya, negara-negara Uni Eropa, karena masih merupakan bentuk strategis. Setelah serangkaian perubahan, termasuk perubahan pada periode 2005-2009. Pada tahun 2009, Directive 2009/28 / EC telah disetujui oleh Parlemen dan Dewan Eropa (Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa 2009).

Sesuai dengan undang-undang Uni Eropa, *Treaty of Lisbon* atau *Treaty of the Establishment of European Community* (European Community 1997). Perjanjian yang ditandatangani pada 13 Desember 2007 dan diratifikasi pada 1 Desember 2009, mengubah *Treaty of Maastricht* dan *Treaty of Rome*, yang merupakan dasar dari Konstitusi dan sumber hukum utama di Uni Eropa. Terkait langsung dengan Treaty of Lisbon, Directive 2009/28/EC merupakan produk sah yang lebih mengikat Negara Anggota dan memiliki efek hukum yang lebih tahan lama dibandingkan SDS (European Community). 2015) 1. Secara umum, arahan ini dibagi sebagai berikut: Kedua bagian tersebut, bagian pertama, terdiri dari pendahuluan yang memberikan penjelasan tentang latar belakang konseptual di balik pembuatan pedoman, dan bagian kedua adalah bagian utama dari pedoman itu sendiri.

Bagian pendahuluan menjelaskan konsep-konsep kebijakan pembangunan berkelanjutan yang sedang dipertimbangkan untuk korelasinya dengan kebijakan lingkungan dari Perjanjian Lisbon (Masyarakat Eropa 2015). Secara total, bagian pengantar ini terdiri dari 97 poin, menjelaskan istilah dan bagaimana kaitannya dengan badan hukum atau objek selain *Directive 2009/28/EC*. Poin-poin penting dari pendahuluan adalah sebagai berikut, *Pertama*, pada poin 1 – 3 dapat ditemukan bahwa desain kebijakan *sustainable development* Uni Eropa juga mempertimbangkan subsidi protokol Kyoto untuk mengurangi reduksi gas emisi terhitung sejak 2012. *Kedua*, pada poin ke 9, ditemukan adanya keharusan menghasilkan sistem evaluasi yang meliputi keharusan untuk menggunakan biogas secara bertahap untuk pemakin energi sejak tahun 2010 dan 20% dari total pemakaian pada 2020, serta amanat untuk menggunakan minimum 10% dari total konsumsi energi untuk menggunakan biogas yang dibagi bersama penggunaan minyak fosil dan disel pada 2020. *Ketiga*, pada poin ke 12 juga mengatur tentang jenis – jenis penggunaan produk agrikultur seperti residu organik hewan untuk menghasilkan biogas ini sebagai salah satu cara mengurangi dampak emisi gas rumah kaca.⁹

⁹ Herry Wahyudi, "Pengaruh Renewable Energi Directive oleh Uni Eropa untuk menekankan penolakan impor crude palm oil di Indonesia", Vol.2, No.2 (2019) p.92 – 114, pdf <https://media.neliti.com/media/publications/322195-penggunaan-renewable-energi-directive-01-455cca67.pdf>

PEMBAHASAN

Kebutuhan Pasokan Energi di Uni Eropa

Uni Eropa sangat bergantung akan kebutuhan energi guna menjalankan industry dan kebutuhan nasional yang ada pada tiap anggota Negara hal ini menjadikan Uni Eropa bermitra dengan beberapa Negara yang memiliki sumber daya energi yang cukup yang nantinya bias di *trade* sesuai kesepakatan dari kerjasama tiap anggota Negara Uni Eropa dengan mitra atau Negara yang sebagai pelaku *supplier* dari kebutuhan energi tersebut. Kebutuhan energi yang dimiliki Uni Eropa pada tahun pertengahan 2004 – 2010 mengalami krisis disaat hubungan Uni Eropa dengan Negara timur tengah terkhusus di bidang minyak mengalami hubungan yang terpuruk akibat sentiment keamanan yang terjadi di timur tengah. Hal ini menjadikan Uni Eropa serta mitra berburu pasar baru untuk mendapatkan energi guna memenuhi kebutuhan Uni Eropa, dan Rusia menjadi sasaran pasar untuk melengkapi kebutuhan energi Uni Eropa.

Dengan adanya tren politik yang meningkat di Timur Tengah memaksa Uni Eropa untuk mencari sumber energi alternatif selain minyak, yaitu gas alam. Saat ini, Rusia adalah pengeksport gas terbesar di Eropa, di mana Eropa membeli 40% gasnya dan 30% minyaknya dari Rusia. Rusia adalah salah satu produsen energi terbesar di dunia, Rusia adalah negara terpenting bagi ketahanan energi Eropa. Tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk pengoperasian roda industri. Sedangkan menurut perhitungan regional, Eropa masih mengimpor 30% minyak dan 50% gas alam dari Rusia. Jika hal ini terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2030, ketergantungan Eropa terhadap energi (minyak dan gas alam) dari Rusia akan sangat tinggi, hingga 80%. Apa yang telah membuat Rusia penting bagi Eropa adalah kehadiran Gazprom. Gazprom sendiri merupakan perusahaan gas alam yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Rusia lebih dari 50%.

Ketergantungan akan gas alam dan minyak pada eropa semakin terpuruk dikarenakan Rusia mampu memaksa perusahaan minyak Inggris BP (*British Petroleum*) untuk menjual saham mayoritas di ladang minyak raksasa gas Kovykta ke Gazprom. Hal ini telah memperkuat pengelolaan sumber daya mineral yang secara strategis penting untuk kepentingan nasional Rusia. Dengan kekuatan energi itu, Rusia juga bisa mendominasi Eropa. Tidak hanya itu, Rusia menerapkan kebijakannya pada tahun 2007 dengan menandatangani undang-undang yang menarik diri dari kesepakatan negara-negara asli Eropa. Langkah-langkah yang diambil pada saat itu tampaknya menunjukkan kekuatan Rusia yang semakin besar. Sikap ini dapat dijadikan sebagai kebijakan untuk mengekang pengaruh asing, dalam hal ini dapat melawan Rusia, khususnya di Eropa. Hingga secara keseluruhan, anggota UE mengimpor 50% dari total pasokan energi mereka, dan para ahli juga mempekirakan bahwa impor akan meningkat menjadi 70% dan konsumsi gas alam menjadi 80% pada tahun 2030. Tidak seperti minyak, pasar gas alam juga

bergantung pada pengaturan pasokan jangka panjang, misalnya di negara yang miskin energi tetapi kaya akan teknologi dan modal.¹⁰

Strategi Uni Eropa dalam Upaya Pengamanan Pasokan Energi Pasca Konflik Rusia–Ukraina 2014

Pada statistik tercatat pada poin sebelumnya bahwa Uni Eropa memasok kebutuhan gasnya sebanyak 40% serta 30% pada sektor minyak yang mana apabila dirincikan ada 10 negara Uni Eropa tertinggi yang bergantung pada pasokan energi Rusia yaitu: (1) Latvia sebesar 100%; (2) Estonia sebesar 100%; (3) Slovakia sebesar 100%, (4) Finlandia sebesar 100%. (5) Bulgaria sebesar 80%, (6) Lithuania sebesar 80%, (7) Ceko sebesar 80 %, (8). Yunani sebesar 60%, (9). Austria sebesar 60%, dan (10) Hongaria sebesar 60% melalui poin poin tersebut menunjukkan bahwa Uni Eropa sangat bergantung pada energi yang dimiliki oleh Rusia memiliki kekuatan besar di sektor gas dan energi. Rusia juga memiliki kekuatan militer yang cukup kuat, di mana Rusia mewarisi sekitar 50% persenjataan dan aset ekonomi yang dimiliki oleh Uni Soviet sebelumnya. Ketergantungan UE yang tinggi terhadap pasokan gas Rusia juga menjadikannya kekuatan dan memiliki baragain power untuk bekerja sama dengan UE di bidang energi. Sementara itu, dalam tindak ekspansi UE terhadap Ukraina , proses perluasan pengaruh UE di Eropa Timur dianggap sebagai bentuk penghinaan yang melemahkan kekuatan dan hegemoni Rusia di Eropa Timur. Dari sudut pandang Rusia, kedekatan Uni Eropa dengan Ukraina merupakan ancaman bagi Rusia.

Dengan hubungan yang kurang baik pasca perang atau krisis Krimea 2014 menjadikan Uni Eropa mengambil sikap untuk memproteksi kekuatan ekonomi maupun energi Uni Eropa di bawah komando tiga raksasa besar yaitu Jerman, Prancis, dan Inggris mengatur beberapa strategi Konfrontasi Uni Eropa terhadap Rusia khususnya pada strategi pengamanan energi Uni Eropa. Ada beberapa upaya yang dilakukan Uni Eropa alam menjaga kestabilan energi yaitu:

1. melakukan stress test, latihan darurat energi di mana UE mensimulasikan gangguan pasokan energi. Dalam simulasi tersebut, UE membuat dua skenario gangguan, pertama UE tidak akan menerima pasokan gas dari Rusia selama enam bulan dan kedua UE akan mendapatkan pasokan gas melalui Ukraina. Hasilnya adalah dampak yang signifikan terhadap negara-negara anggota UE, terutama di Uni Eropa Timur, yang notabene bergantung pada pasokan gas Rusia Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, UE telah mengantisipasi ketahanan energi jangka panjang dan jangka pendek, termasuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pemasok energi regional dan meningkatkan negara-negara penghasil energi internasional
2. melakukan kerjasama energi dengan negara-negara penghasil minyak di Asia Tengah. Permintaan gas UE dari Asia Tengah berasal dari Turkmenistan, Azerbaijan,

¹⁰ Anjar Sulastri,” Politik Energi Rusia dan dampaknya terhadap Eropa terkait sengketa gas Rusia – Ukraina 2006 - 2009”, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga p.12 - 17,

Kazakhstan, dan Uzbekistan. Di antara negara-negara tersebut, Turkmenistan merupakan negara Asia Tengah dengan cadangan minyak sekitar 600 juta barel pada 2015. Sementara itu, cadangan gas alamnya mencapai 265 triliun kaki kubik (Tcf) dan menduduki peringkat enam dunia. Menurut data tahun 2014, dalam sehari negara ini bisa memproduksi hingga 238.000 barel minyak. Sebagai pemilik cadangan minyak terbesar keenam di dunia, UE semakin memperkuat kerjasamanya dengan Turkmenistan. Hubungan kerjasama antara UE dan Turkmenistan mulai berkembang pada tahun 2007, terutama setelah Pertemuan Menteri Luar Negeri UE-Turkmenistan diadakan di Ashgabat, Turkmenistan. Selain Turkmenistan, UE juga memperkuat kerjasama dengan negara-negara penghasil minyak lainnya di Asia Tengah.

3. menjalin kerjasama dengan Norwegia dan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), sebuah asosiasi negara pengekspor minyak yang terdiri dari 12 negara anggota menyumbang sekitar 40% dari total impor minyak mentah UE. Arab Saudi, Libya dan Nigeria adalah pemasok minyak mentah terbesar di antara semua negara anggota OPEC. UE bertemu setiap tahun dengan OPEC membahas berbagai masalah yang terkait dengan kerjasama minyak dan gas.

Peningkatan kerjasama ini membawa keuntungan ganda bagi UE, yaitu mengatasi ketergantungan dan melemahkan ekonomi Rusia yang bergantung pada ekspor gas. Setelah embargo, rubel yang merupakan mata uang Rusia mengalami penurunan nilai tukar terhadap dolar AS sebesar 3.032 rubel menjadi satu dolar AS, kemudian pada tahun 2014 mencapai 36 rubel satu dolar AS. Selain itu, harga minyak juga anjlok dari 100 USD/barel menjadi kurang dari 60 USD/barel, sehingga menyebabkan inflasi di Rusia mencapai 7%. Hal ini menunjukkan bahwa UE bukannya tidak berdaya meski Rusia telah berhenti memasok gas, terbukti dengan adanya embargo ekonomi UE terhadap Rusia yang telah melemahkan rubel terhadap dolar AS.

Kemudian Uni Eropa melakukan tindakan penguatan kekuatan Uni Eropa dengan mendapatkan dukungan dari *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dalam menjaga kestabilan energi serta mendukung embargo terhadap Rusia. Dengan meningkatnya kekuatan militer akibat dukungan dari NATO menjadikan Rusia mulai memperhitungkan tindakan yang diambil oleh Uni Eropa memiliki potensi yang sangat berbahaya bagi keaulatan Rusia.

Kemudian yang ketiga Uni Eropa melakukan tindak perluasan anggota Uni Eropa agar menunjukkan bahwa Uni Eropa merupakan organisasi superioritas atas Rusia dimana pada 25 September 2014 melalui pernyataan Presiden Petro Poroshenko, Ukraina akan bergabung dengan UE pada tahun 2020¹¹

¹¹ Ummu Ro'iyatu Nahdiyati Millati Hanfifah, "Embargo Ekonomi sebagai Strategi Konfrontasi Uni Eropa terhadap Rusia pada Masa Konflik Ukraina 2014 -2015", *Jurnal sospol*, Vol.3 , No.2(Juli – Desember 2017)p.179 – 187,

Kebijakan Energi Uni Eropa Pasca Brexit

Dengan keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa, banyak hak istimewa yang icabut serta ditangguhkan secara berkala seperti sebelumnya menjadi anggota *the European Investment Bank* (EIB), *the European Fund for Strategic Investment* (EFSD), *the Connecting Europe Facility* (CEF), the EU Horizon 2020 programme (H2020) and *the European Energi Programme for Recovery* (EEPR) dicabut serta hanya diberi akses yang limit terhadap EFSD, CEF, H2020, dan EEPR.

Kemudian pada perihal energi kebijakan Uni Eropa dan Inggris terbagi menjadi beberapa poin sebagai berikut.

Kebijakan Energi dan Iklim Uni Eropa

Keluarnya Inggris dari Sistem Perdagangan Emisi UE (ETS) dapat menyebabkan surplus tunjangan jangka pendek ini menjadikan ketakutan Uni Eropa akan Inggris tidak lagi patuh akan program Emisi tersebut. Dalam jangka panjang, Brexit kemungkinan besar akan menyebabkan pengetatan sistem. Jika Inggris dapat tetap berada dalam sistem hingga akhir fase ketiganya pada tahun 2020, ini dapat mengurangi resiko masalah emisi yang sebelumnya di sepakati pada Uni Eropa. Karena target efisiensi energi didefinisikan sebagai pengurangan dibandingkan dengan garis dasar, kami mengira bahwa setiap negara anggota pada dasarnya diminta untuk mengurangi konsumsi mencapai 30%. Oleh karena itu, Brexit tidak akan menyiratkan perubahan dalam kontribusi nasional untuk memenuhi target efisiensi energi di seluruh UE

Kebijakan Keamanan Pasokan Listrik dan Gas

Mengumpulkan sumber daya energi di antara Negara-negara Anggota sangat penting bagi UE untuk membangun pasar energi internal yang umum dan benar-benar terintegrasi yang mampu menahan guncangan eksternal. Mengingat integrasi energi Inggris yang terbatas dengan Uni Eropa, keamanan pasokan listrik dan gas antara Inggris dn Uni Erop itu tidak akan terpengaruh secara substansial oleh Brexit. .

Proyeksi Kebijakan Euroatom

Inggris telah keluar dari Euratom serta UE. Ini membutuhkan pengaturan yang jelas tentang masalah-masalah seperti perlindungan peralatan dan limbah radioaktif. Mengenai perlindungan peralatan, UE dan Inggris setuju bahwa Komunitas Euratom harus mentransfer peralatan dan properti lain yang terletak di wilayah Inggris terkait dengan penyediaan perlindungan. Nilai aset yang akan ditransfer akan mewakili elemen kunci dari negosiasi. Mengenai limbah radioaktif, kedua pihak tampaknya sepakat pada

prinsip bahwa tanggung jawab harus diberikan kepada negara di mana bahan bakar bekas atau limbah radioaktif dihasilkan. Namun, ketidaksepakatan kemungkinan akan muncul selama negosiasi. Mempertimbangkan sifat yang sangat teknis dari masalah ini, ada seruan agar Inggris tetap berada di Euratom. Namun, bahkan jika Euratom secara hukum diatur oleh perjanjian terpisah, fungsinya tergantung pada lembaga-lembaga UE. Untuk alasan ini, Euratom tidak boleh dianggap terpisah dari berkas Brexit yang lebih luas.

Kebijakan Pasar Energi terhadap Perusahaan Inggris dan Uni Eropa

Sejumlah besar perusahaan Eropa aktif di pasar gas dan listrik Inggris dan memegang pangsa pasar yang signifikan di sana. Mereka tunduk pada risiko peraturan di lingkungan pasca Brexit Inggris tidak lagi terikat pada aturan UE. London memiliki peran utama dalam perdagangan hak listrik, gas, minyak dan emisi di Eropa. Untuk UE, penting untuk memastikan bahwa pedagang energi Inggris yang aktif di UE harus mengikuti setidaknya pasar keuangan yang ketat dan aturan transparansi seperti rekan-rekan UE mereka. London sebagai tempat hukum untuk kasus arbitrase kemungkinan besar tidak akan terpengaruh., perusahaan mungkin memutuskan untuk meninggalkan London untuk persaingan pasar. Meskipun keberlakuannya tidak berada di bawah ancaman, prosedur yang memberatkan dapat meningkatkan biaya penegakan putusan pengadilan Inggris.¹²

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan keluarnya Inggris jelas merubah arah serta kebijakan Uni Eropa khususnya ada kebutuhan energi dan lainnya, kebijakan dan ketentuan khusus anggota Inggris dicabut serta ditangguhkan namun tidak semua. Hal ini dikarenakan Uni Eropa dan Inggris masih membutuhkan kerjasama tiap wilayah khususnya pada kebutuhan energi ditengah tengah krisis serta ancaman Rusia yang menerjang Ukraina yng cukup mempengaruhi setiap kebijakan yang harus direalisasikan dan ditetapkan secepat mungkin, pengaruh kebijakan yang sebelumnya di dominasi oleh adanya Uni Eropa. Dengan tidak adanya Inggris juga cukup mempengaruhi keadaan Uni Eropa khususnya slot pengisi sumber dana yang diisi oleh Jerman dan Perancis yang pendanaannya ditutupi oleh kedua Negara tersebut. Hal ini sangat mempengaruhi kebutuhan pada sector-sektor program yang dikembangkan khususnya pada permasalahan energi.

¹² Gustav Fredriksson, Alexander Roth, Simone Tagliapierta, George Zachmann, “Directorate General for Internal Policies The Impact of Brexit on the EU Energi System,” study for the ITRE Commitee, IP/A/ITRE/2017 , (November 2017), hal 12 - 17

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D., 'Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta. Clarke, D.H, Dkk.(Tt). Why Britain Voted for Brexit:An Individual –Level Analysis of the 2016 Referendum Vote.', 2017
- Ashari, Muhammad Farhan, dan Rusdiyanta "Potensi Dampak Brexit Terhadap Perekonomian Inggris" (2020), hlm. 196.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjs5rGSutvyAhUUfSsKHTBBCIgQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fjom.fisip.budiluhur.ac.id%2Findex.php%2Fbalcony%2Farticle%2Fdownload%2F231%2F111&usg=AOvVaw3q482zuaQVs22nWytmFoZ3>
- Cline, Ray S. "World Power Trends and U.S. Foreign Policy for the 1980s." In *Politics & International Relations*, 1st Ed. New York: Routledge, 1980.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780429267918>.
- FERN, "Panduan Singkat Tentang Uni Eropa" *Life Program of The European Union dan Ford Foundation*, 2021, 1–3
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2021/PANDUAN_SINGKAT_TENTANG_UNI_EROPA_BAHASA.pdf
- Firzani, Muhammad Rizki," Penolakan Jerman Terhadap Pergantin Made In Germany menjadi Made In EU tahun 2010 - 2014", Vol.2,No.2(2015)p.1 – 4, [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/e-journal%20Indah%20Sri%20Lestari%20\(08-23-17-03-52-34\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/e-journal%20Indah%20Sri%20Lestari%20(08-23-17-03-52-34).pdf)
- Fajrian, Happy "Uni Eropa siapkan strategi Energi baru agar tak tergantung gas Rusia", diakses pada Senin, 11 April dari Katadata.co.id
<https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6218cd9316c2c/uni-eropa-siapkan-strategi-energi-baru-agar-tak-tergantung-gas-rusia>.
- Lestari, Indah Sri," Penarikan iri Inggris dari Uni Eropa tahun 2016", Vol.5, No.3 (2017) p. 1025 - 1030
- Mohtar, Mas'oed. *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Disiplin Dan Metodologi*. Edisi Revi. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1994.
- Pasuhuk, Henra "Sejarah Terbentuknya Cikal Bakal Uni Eropa 70 Tahun Lalu" DW, 24 Mei

2019, <https://www.dw.com/id/sejarah-terbentuknya-cikal-bakal-uni-eropa-70-tahun-lalu/a48861327#:~:text=Untuk%20pertama%20kalinya%20sejak%20akhir,menjadi%20cikal%20bakal%20Uni%20Eropa.>

Rosyidin, Mohammad, *Teori Hubungan Internasional Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*, ed. by Yayat Sri Hayati, First Edit (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Rasimin. "Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Kualitatif," 2018. [http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4494/1/METODOLOGI PENELITIAN Pendekatan Praktis Kualitatif.pdf](http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4494/1/METODOLOGI_PENELITIAN_Pendekatan_Praktis_Kualitatif.pdf).

Sulastri, Anjas., 'Politik Energi Rusia dan dampaknya terhadap eropa terkait sengketa gas Rusia - Ukraina 2006 - 2009. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga.', 2017

Wahyudi, Harry, "Penggungan Renewable Energi irective oleh Uni Eropa untuk menekankan Penolakan impor crude palm oil di Indonesia", Vol.2,No.2(2019) p.92 – 114, pdf<https://media.neliti.com/media/publications/322195-penggunaan-renewable-energi-directive-ol-455cca67.pdf>